

Salah satu persoalan besar yang dihadapi Indonesia belakangan ini adalah menurunnya kontribusi sektor industri pada pertumbuhan ekonomi nasional. Penyebab dari penurunan kontribusi sektor tersebut tidak hanya karena persoalan internal yang menyangkut daya saing dan produktivitas sektor industri, melainkan juga karena adanya persoalan eksternal, terutama menyangkut kebijakan nasional yang rentan dengan dinamika perekonomian global maupun dampak persaingan global itu sendiri.

Akibatnya, upaya untuk menyediakan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan peningkatan perolehan devisa negara melalui sektor industri berjalan lambat. Keadaan ini tentu tidak dapat dibiarkan, terlebih-lebih jika disadari perekonomian nasional mendatang akan semakin lebih terbuka, baik sebagai akibat komitmen globalisasi secara umum dan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN khususnya. Oleh karena itu, upaya keras dan cerdas untuk menyikapi kemunduran sektor industri kini dan mendatang harus dilakukan jika Indonesia sungguh-sungguh ingin menjadi negara maju.

Buku yang ada di tangan pembaca ini, ditujukan untuk memberikan catatan-catatan penting yang harus diperhatikan dalam menyikapi kemunduran sektor industri mendatang. Dalam buku ini tidak saja diberikan analisis terhadap berbagai aspek dan pandangan mengenai kebijakan industri nasional, dan strategi, serta upaya pengembangan industri nasional, melainkan juga didiskusikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses penerapan kebijakan dan pengembangannya maupun upaya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.



Diterbitkan oleh :
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika



ISBN 978-602-1247-25-9



Penyunting:
Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, MADE, APU

KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI NASIONAL DI INDONESIA



KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI NASIONAL DI INDONESIA



Penyunting:

Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, MADE, APU

KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI NASIONAL DI INDONESIA



Diterbitkan oleh:
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika
2014



Judul:

Kebijakan dan Pengembangan Industri Nasional di Indonesia

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

xiii+206 hlm.; 15.5x23 cm

ISBN: 978-602-1247-25-9

Cetakan Pertama, 2014

Penulis:

Ari Mulianta Ginting

Eka Budiyantri

Juli Panglima Saragih

Rasbin

Venti Eka Satya

Iwan Hermawan

Penyunting:

Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, MADE, APU

Desain Sampul:

Aiq Banindya Afad

Tata Letak:

Zaki

Diterbitkan oleh:

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama:

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012

Kantor Pusat:

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta

Telp. +62 274-6882748

Perwakilan Jabodetabek:

Perum Wisnamas Blok E1 No. 43-44, Cinangka, Sawangan, Kota Depok

Telp. (021) 7417244

Sanksi Pelanggaran Pasal 72**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PENGAJIAN, PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI (P3DI)
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera,

Saya menyambut dengan baik dan memberikan apresiasi atas penerbitan buku bunga rampai dengan judul “Kebijakan dan Pengembangan Industri Nasional di Indonesia” yang digagas oleh peneliti P3DI, Setjen DPR RI. Hasil analisis berupa gagasan dan pemikiran serta pengalaman empiris yang dituangkan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan masukan dalam pengembangan industri nasional Indonesia.

Pendekatan analisis dilakukan berdasarkan *review* berbagai kajian terkait serta analisis empiris berdasarkan studi-studi sebelumnya. Struktur buku terdiri atas 6 (enam) bagian tulisan yang memiliki konektivitas yang baik untuk memperkaya pemahaman tema kebijakan dan pengembangan industri nasional. Visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru. Oleh karena itu, pengembangan industri dengan keunggulan kompetitif sangat penting untuk menghadapi persaingan ketat, baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia.

Saya sampaikan apresiasi kepada rekan-rekan peneliti dan terima kasih kepada Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, MADE, APU. yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya sebagai editor buku ini. Kepada penerbit disampaikan penghargaan tinggi atas

Kata Sambutan

kerja samanya dalam penerbitan bersama dengan P3DI, Setjen DPR-RI. Besar harapan saya, buku ini akan bermanfaat dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Oktober 2014
Kepala Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Rahaju Setya Wardani

KATA PENGANTAR

Sektor industri terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi. Kontribusi sektor industri dapat dilihat dari PDB, penyerapan tenaga kerja, investasi yang telah dikeluarkan, dan devisa. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika sebagian besar negara maju ditandai dengan berkembangnya sektor industri dalam perekonomian nasionalnya.

Perkembangan industri di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Tantangan tersebut terbagi dalam dua hal utama, *pertama*, sisi internal yang meliputi penciptaan struktur pasar yang sehat, peningkatan daya saing produk industri yang *export oriented*, membanjirnya produk impor, dan integrasi antara industri hulu dan hilir. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Kebijakan pemerintah yang fokus melindungi industri dalam negeri, baik *natural resource based industry* maupun *labour intensive based industry*, dan aturan main yang lebih jelas diharapkan dapat lebih mendorong kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat. *Kedua*, sisi eksternal berkaitan dengan dengan konteks pasar internasional dan regional. Contohnya daya saing industri menengah dan industri kecil (IKM) yang mulai eksis dalam industri nasional ketika menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 1 Januari 2015.

Buku bunga rampai dengan tema “Kebijakan dan Pengembangan Industri Nasional di Indonesia” berusaha memetakan perkembangan, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi oleh sektor industri nasional (baik migas dan nonmigas) saat ini dan ke depan. Bagaimanapun juga ekspor Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh hasil-hasil dari industri manufaktur nonmigas. Oleh sebab itu tidak berlebihan apabila berbagai tulisan dalam buku ini penting untuk dibaca.

Kata Pengantar

Buku ini ditulis oleh 6 (enam) peneliti yang sehari-hari bekerja di P3DI DPR RI, di mana mereka tidak jarang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Buku tentang “Kebijakan dan Pengembangan Industri Nasional di Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu koleksi referensi yang berkaitan langsung dengan sektor industri. Sebagai akhir kata, saya sebagai penyunting, mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah mempercayakan kepada saya untuk memberi koreksi, masukan, dan pemikiran yang relevan guna menyempurnakan substansi dari buku ini.

Jakarta, Oktober 2014
Penyunting,

Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, MADE, APU
Profesor Riset LIPI dan Guru Besar Ilmu
Ekonomi Universitas Tarumanagara

PROLOG

Salah satu persoalan besar yang dihadapi Indonesia belakangan ini yaitu menurunnya kontribusi sektor industri pada pertumbuhan ekonomi nasional. Penyebab dari penurunan kontribusi sektor ini tidak hanya karena persoalan internal yang menyangkut daya saing dan produktivitas sektor industri, melainkan juga karena adanya persoalan eksternal, terutama menyangkut kebijakan nasional yang rentan dengan dinamika perekonomian global maupun dampak persaingan global itu sendiri. Akibatnya, upaya untuk menyediakan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan peningkatan perolehan devisa negara melalui sektor industri berjalan lambat. Keadaan ini tentu tidak dapat dibiarkan, terlebih-lebih jika disadari perekonomian nasional mendatang akan semakin lebih terbuka, baik sebagai akibat komitmen globalisasi secara umum dan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN khususnya. Oleh karena itu, upaya keras dan cerdas untuk menyikapi kemunduran sektor industri kini dan mendatang harus dilakukan jika Indonesia sungguh-sungguh ingin menjadi negara maju.

Buku yang berjudul **“Kebijakan dan Pengembangan Industri Nasional di Indonesia”** ini salah satunya ditujukan untuk memberikan catatan-catatan penting yang harus diperhatikan dalam menyikapi kemunduran sektor industri mendatang. Dalam buku ini tidak saja diberikan analisis terhadap berbagai aspek dan pandangan mengenai kebijakan industri nasional, dan strategi, serta upaya pengembangan industri nasional, melainkan juga didiskusikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses penerapan kebijakan dan pengembangannya maupun upaya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Adapun sistematika buku ini adalah sebagai berikut.

Bagian pertama memuat tulisan yang berjudul **“Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDB Sektor Industri”** yang ditulis oleh Ari Mulianta Ginting. Kinerja industri nasional

terus mengalami perlambatan—yang ditandai dengan penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDB. Penurunan kinerja industri nasional disebabkan oleh perubahan dari variabel-variabel yang mempengaruhinya, seperti investasi dan tenaga kerja. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba memberikan gambaran dan analisis secara umum pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan sektor industri di Indonesia.

Bagian kedua dilanjutkan dengan tulisan dari Eka Budiyantri yang berjudul “Urgensi Bank Khusus Industri Kaitannya dalam Mendukung Industri Nasional di Indonesia”. Masalah utama yang dihadapi oleh sektor industri selama ini adalah sulitnya akses pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan bank selama ini masih bersifat jangka pendek, padahal di satu sisi industri membutuhkan pembiayaan yang sifatnya jangka panjang. Hal ini yang menyebabkan adanya wacana pemerintah untuk segera membentuk bank khusus industri. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menggambarkan urgensi pembentukan bank khusus industri di Indonesia dalam kaitannya untuk mendukung sektor industri nasional.

Kemudian **bagian ketiga** dilanjutkan dengan tulisan dari Juli Panglima Saragih mengenai “**Peran Industri Manufaktur dan Kebijakan Pengembangannya Pasca UU Nomor 3 Tahun 2014**”. Dalam tulisan ini digambarkan mengenai pentingnya sektor industri manufaktur dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu sektor industri manufaktur juga merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan investasi. Tulisan ini menganalisis bagaimana peran industri manufaktur bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya melalui perspektif kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasca dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2014.

Bagian keempat ditulis oleh Rasbin dengan judul “**Indikator Kualitas Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan Sektor Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja**”. Kualitas pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dilihat dari pertumbuhan sektor industri. Hal ini dikarenakan sektor industri merupakan salah satu sektor ekonomi penyerap tenaga kerja terbanyak. Oleh karena itu -tulisan ini mencoba menganalisis kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan indikator pertumbuhan sektor industri dan tenaga kerja.

Selanjutnya **bagian kelima** ditulis oleh Venti Eka Satya berjudul “**Kesiapan Industri Manufaktur Indonesia dalam Menyongsong**

Terbentuknya ASEAN Economic Community (AEC) 2015". AEC diimplementasikan pada tahun 2015. Wilayah ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi tunggal, di mana arus barang dan jasa, keuangan, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal intrakawasan akan bergerak semakin bebas tanpa hambatan. Sebelum memasuki AEC, persiapan-persiapan terutama dalam sektor industri sangat penting dilakukan. Hal ini dikarenakan sektor industri merupakan sektor utama dalam perekonomian nasional. Kesiapan sektor industri dalam persaingan AEC akan mendorong Indonesia menjadi lebih kompetitif sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar saja. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menganalisis mengenai bagaimana kondisi perindustrian di Indonesia saat ini dan persiapan yang dilakukan menuju AEC, serta bagaimana daya saing sektor industri jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Terakhir, **bagian keenam** memuat tulisan dari Iwan Hermawan yang berjudul **"Revitalisasi Industri Pupuk Melalui Ketersediaan Gas Bumi di Indonesia"**. Kebijakan pemerintah yang merealokasi pemanfaatan gas bumi dari *revenue objective* menjadi *economic growth objective* menjadi momentum untuk mendukung revitalisasi industri pupuk. Ketersediaan dan distribusi pupuk yang baik akan mendorong pertumbuhan sektor pertanian, industri produk-produk pertanian, dan pada akhirnya juga akan berkontribusi terhadap pencapaian ketahanan pangan nasional. Tulisan ini mencoba menganalisis perkembangan revitalisasi industri pupuk dikaitkan dengan ketersediaan gas bumi, yang notabene juga dihadapkan pada tantangan distribusinya.

Penyunting memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan selamat kepada Tim Penulis Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI atas terbitnya buku ini. Penyunting meyakini kajian dalam buku ini dapat memberikan inspirasi dan masukan penting bagi para pengambil kebijakan, terutama pihak legislatif. Buku ini juga diyakini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca yang ingin mendalami pengetahuan tentang kebijakan dan pengembangan industri nasional. Selamat Membaca.

Jakarta, Oktober 2014
Penyunting

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
PROLOG	vii
DAFTAR ISI	xi

BAGIAN I

PENGARUH INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDB SEKTOR INDUSTRI

<i>oleh: Ari Mulianta Ginting</i>	1
I. PENDAHULUAN.....	2
II. GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI, INVESTASI, DAN TENAGA KERJA DI SEKTOR INDUSTRI INDONESIA.....	6
III. ANALISA KUANTITATIF PENGARUH INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDB SEKTOR INDUSTRI DI INDONESIA	11
IV. PENUTUP.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	26

BAGIAN II

URGENSI BANK KHUSUS INDUSTRI KAITANNYA DALAM Mendukung Industri Nasional di Indonesia

<i>oleh: Eka Budiyaniti</i>	31
I. PENDAHULUAN.....	32
II. STRUKTUR PERBANKAN DAN INDUSTRI DI INDONESIA	34
III. KREDIT PERBANKAN PADA SEKTOR INDUSTRI.....	39
IV. BANK DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN KHUSUS INDUSTRI DI BEBERAPA NEGARA.....	43
V. URGENSI BANK KHUSUS INDUSTRI.....	48
VI. PENUTUP.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53

BAGIAN III
PERAN INDUSTRI MANUFAKTUR DAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGANNYA
PASCA UU NOMOR 3 TAHUN 2014

oleh: Juli Panglima Saragih57

I. PENDAHULUAN.....58

II. PENDAHULUAN STRUKTUR INDUSTRI61

III. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI MANUFAKTUR DI MASA DATANG.....64

IV. KEBIJAKAN INDUSTRI DALAM
UU NOMOR 3 TAHUN 2014.....80

V. PENUTUP.....83

DAFTAR PUSTAKA.....85

BAGIAN IV
INDIKATOR KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI:
PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI DAN
PENYERAPAN TENAGA KERJA

oleh: Rasbin.....87

I. PENDAHULUAN.....88

II. PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA91

III. INDIKATOR KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI.....99

IV. PENUTUP..... 111

DAFTAR PUSTAKA..... 113

BAGIAN V
KESIAPAN INDUSTRI MANUFAKTUR INDONESIA
DALAM MENYONGSONG TERBENTUKNYA
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015

oleh: Venti Eka Satya..... 115

I. PENDAHULUAN..... 116

II. ASEAN ECONOMIC COMMUNITY SEBAGAI
SALAH SATU DARI TIGA PILAR
ASEAN COMMUNITY 120

III. KONDISI PERINDUSTRIAN INDONESIA 126

IV. KESIAPAN INDUSTRI INDONESIA DALAM
MENYAMBUT AEC..... 138

V. PENUTUP..... 147

DAFTAR PUSTAKA..... 149

BAGIAN VI

**REVITALISASI INDUSTRI PUPUK MELALUI
KETERSEDIAAN GAS BUMI DI INDONESIA**

<i>oleh: Iwan Hermawan</i>	153
I. PENDAHULUAN.....	154
II. PERKEMBANGAN INDUSTRI GAS BUMI DAN INDUSTRI PUPUK.....	158
III. KEBIJAKAN REALOKASI GAS BUMI UNTUK PENGEMBANGAN INDUSTRI PUPUK.....	169
IV. KEBIJAKAN REVITALISASI PABRIK PUPUK DAN KETERSEDIAAN GAS BUMI.....	176
V. PENUTUP.....	182
DAFTAR PUSTAKA.....	183
EPILOG	189
INDEKS	193
BIOGRAFI EDITOR	201
BIOGRAFI PENULIS	203

EPILOG

Peran pembangunan sektor industri sangat penting dan strategis karena kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang besar. Era globalisasi ekonomi berdampak pada semakin ketatnya persaingan dan perubahan lingkungan usaha. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan sektor industri yang memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif, antara lain industri yang berbasis sumber daya alam (baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan), sumber daya manusia, teknologi, pemenuhan kebutuhan pasar (domestik dan global), serta budaya. Melalui sektor industri, sumber daya yang tersedia perlu didayagunakan secara optimal untuk kepentingan nasional.

Ari Mulianta Ginting memberikan paparan bahwa untuk memacu pertumbuhan PDB sektor industri, pemerintah harus dapat mendorong pertumbuhan terutama investasi di samping tenaga kerja. Untuk itu kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri dalam dunia usaha seperti korupsi, inefisiensi birokrasi, infrastruktur yang tidak memadai, akses keuangan yang kurang, serta peraturan ketenagakerjaan yang rumit dan membelit harus segera diselesaikan. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut agar tercipta iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan investasi di sektor industri.

Dalam kaitannya dengan pendanaan sektor industri di Indonesia, Eka Budiyanti menekankan bahwa untuk membiayai sektor riil yang produktif seperti sektor industri, diperlukan suatu lembaga pembiayaan khusus. Dalam proses pembentukan bank khusus industri ini, diperlukan perhatian dan pertimbangan yang besar dalam hal koordinasi, sumber dana dan sumber daya manusia, fokus pembiayaan, serta birokrasi. Pada akhirnya jika bank khusus industri ini sudah terbentuk, maka diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Juli Panglima Saragih menekankan bahwa setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian diharapkan dapat mendorong perkembangan industri di Indonesia, khususnya industri yang berbasis ekspor. Namun kendala yang dihadapi oleh industri selama ini adalah impor bahan baku dan penolong masih relatif besar. Kondisi inilah yang menyebabkan daya saing industri lokal melemah dan mendorong terjadinya defisit neraca perdagangan.

Sementara itu, Rasbin memberikan pemahaman bahwa saat ini sektor industri, khususnya industri pengolahan mengalami *decreasing return to scale*. Jika situasi ini terus terjadi akan mengakibatkan terjadinya *excess supply* tenaga kerja, karena pertumbuhan jumlah penyerapan tenaga kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Untuk itu, ke depan arah pengembangan industri pengolahan harus difokuskan pada pendalaman struktur industri, sehingga industri pengolahan berdampak signifikan terhadap sektor tenaga kerja.

Dalam kaitannya dengan integrasi ekonomi ASEAN, sektor industri tidak dapat dilepaskan dengan kegiatan ekspor dan impor. Venti Eka Satya menekankan bahwa sektor industri di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini dikarenakan rendahnya daya saing yang disebabkan masih kurangnya dukungan dari pemerintah. Pemerintah harus mengambil kebijakan dan aturan yang kondusif bagi sektor industri, di samping itu diperlukan infrastruktur yang memadai bagi perkembangan industri di Indonesia.

Khusus mengenai industri pupuk di Indonesia, Iwan Hermawan memaparkan bahwa revitalisasi industri pupuk di Indonesia membutuhkan konsep *industry follows energy*. Ketersediaan gas bumi menjadi kunci keberhasilan dan keberlangsungan revitalisasi industri pupuk. Di sisi lain gas bumi menghadapi tantangan besar terkait distribusi yang terbatas dan kebutuhan gas bumi oleh sektor-sektor lainnya. Oleh sebab itu jaminan kelancaran penyediaan dan distribusi gas bumi harus didukung oleh infrastruktur gas bumi nasional yang memadai dan *political will* pengembangan industri gas bumi dan sektor ikutannya di dalam negeri. Keberhasilan revitalisasi industri pupuk akan berdampak nyata terhadap pencapaian ketahanan pangan di Indonesia.

Epilog

Benang merah dari berbagai tulisan dalam tema besar Kebijakan dan Pengembangan Industri Nasional di Indonesia ini memberikan pemahaman dan keyakinan bahwa sektor industri nasional penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu dibutuhkan dukungan nyata agar kontribusinya tidak menurun. Berbagai dukungan tersebut dapat berasal dari (a) pertumbuhan investasi dan iklim investasi yang kondusif, (b) potensi SDM melalui peningkatan tenaga kerja terdidik dan terampil, (c) potensi SDA diwujudkan sebagai bahan baku dan bahan penolong untuk mengurangi impor input, (d) perkembangan kelembagaan keuangan, regulasi, dan kedalaman struktur industri, dan (e) perkembangan infrastruktur dan logistik.

Jakarta, 31 Oktober 2014
Penyunting

INDEKS

A

AEC, 38, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148
Agro, 33, 37, 38, 66, 67, 68, 70, 74, 79, 122, 155
Akselerasi, 42, 94
Aksesibilitas, 15, 18
Amerika Serikat, 51, 78, 88, 133, 139
Anorganik, 166, 176
APBN, 18, 137, 168
ASEAN *Charter*, 117, 138
ASEAN *Community*, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 138
ASEAN *Economic Community*, 38, 115, 116, 117, 120, 121
ASEAN *Security Community*, 117
ASEAN *Socio-Cultural Community*, 117
ASEAN Vision, 122
ASEAN, 24, 38, 78, 81, 89, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 131, 132, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 163, 176
Asia Pasifik, 116, 159
Asia Tenggara, 80, 111, 118, 120, 121
Asia Timur, 116, 130

B

Bahan baku, 63, 65, 67, 68, 70, 73, 81, 84, 94, 100, 126, 134, 135, , 143, 157, 165, 168, 173, 176
Bank Indonesia, 6, 18, 39, 48, 49, 92
Bank khusus industri, 31, 32, 33, 43, 48, 49, 50, 51, 52
Bank komersial, 32, 49
Bank of Industry Nigeria, 45
Bank, 35, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 92, 137
Bapindo, 49
Bappenas, 16, 24
Barang modal, 5, 63, 65, 71, 94, 137
Basis produksi, 118, 121, 122, 144
Birokrasi, 15, 17, 25, 51, 72, 128, 172
BLUE, 12
Blueprint, 122, 138
BPS, 2, 5, 6, 10, 21, 38, 40, 41, 94, 104, 111, 136, 154
BUMD, 33, 48, 172
BUMN, 33, 48, 64, 80, 155, 162, 163, 171, 172, 173, 174, 177
Bunga pinjaman, 18, 33
Burma, 117
Buyer's credit, 33

C

CAFTA, 117, 118
CAR, 34, 35, 50
Care of human security, 117

Cebu, 117
 Cetak biru, 121
Ceteris paribus, 13
 China, 45, 70, 84, 116, 117, 121, 124, 126, 132, 134, 142
 Cobb Douglas, 4, 6
Community, 38, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 138
Comparative advantage, 73, 130
Competitive advantage, 74, 130, 144
Competitive Industrial Index, 139
 CPO, 38, 68

D

Dalam negeri, 9, 13, 25, 33, 37, 38, 40, 41, 51, 61, 68, 70, 73, 74, 78, 79, 81, 84, 112, 118, 126, 129, 137, 138, 142, 145, 147, 156, 157, 161, 162, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 174, 177
 Darmin Nasution, 92
 Daya beli, 94, 138, 157, 165, 176
 Daya saing, 16, 46, 61, 65, 66, 70, 72, 74, 79, 84, 94, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 134, 137, 140, 144, 145, 146, 147, 148, 171
 Daya serap ekonomi, 104
Decreasing return to scale, 111
 Defisit, 84, 125, 133, 142, 143, 160
 Deindustrialisasi, 4, 39, 100
 Depresiasi, 94
 Deregulasi, 34, 35
Development Bank of Japan, 47
 Dolar, 75, 94
 DPK, 35, 36, 49
 DPR, 52, 59
 Dunia, 16, 42, 44, 46, 59, 65, 68, 70, 73, 78, 88, 91, 92, 99, 111, 118, 119, 123, 134, 135, 138, 139, 142, 143, 147, 162, 168

E

Ekonomi kawasan, 118, 123, 116, 122
 Ekonomi regional, 116, 122
 Ekonomi, 2, 5, 16, 17, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 73, 76, 77, 78, 80, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 147, 154, 176, 180
 Ekspor, 14, 37, 38, 40, 48, 49, 63, 67, 68, 70, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 90, 92, 93, 94, 96, 99, 100, 105, 112, 124, 129, 131, 133, 134, 135, 139, 142, 144, 147, 161, 162, 165, 168, 170, 171, 180
 Eksternal, 116, 121, 123, 134, 135
 Eropa, 47, 51, 64, 75, 88, 89, 91, 101, 134, 145
Excess supply of labour, 20
Excess supply, 20, 111

F

Fiskal, 4, 5, 24, 67, 83, 94, 125, 171
Forecast, 21
 FTAs, 130, 131
 Fundamental, 111, 119
 Fungsi produksi, 5

G

Garis kemiskinan, 89
 Gas Bumi, 96, 129, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182

- Geoekonomi, 117
 Geopolitik, 117
 Global, 15, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 66, 73, 77, 78, 79, 81, 84, 88, 95, 112, 116, 117, 119, 121, 123, 130, 171
 Globalisasi, 73, 78, 112, 116
- H**
- Harga berlaku, 101
 Harga konstan, 101
 Harga, 33, 62, 76, 80, 94, 101, 118, 134, 155, 157, 158, 161, 164, 165, 167, 168, 171, 176, 179, 180, 181
 Hariyadi Sukamdani, 24
 Hidayat, 19, 165
 Hilir, 61, 62, 63, 64, 68, 70, 72, 75, 76, 79, 81, 84, 126, 129, 162, 170, 178
 Hilirisasi, 3, 37, 38, 70, 80
 Hulu, 61, 62, 63, 64, 68, 72, 77, 81, 84, 126, 129, 144, 163, 180
- I**
- IGIS, 18
 IIF, 49
 Iklim investasi, 14, 16, 25, 124, 140, 142, 145
 IKM, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 77, 127, 129, 136
 Impor, 40, 41, 51, 63, 70, 73, 77, 78, 79, 84, 99, 124, 131, 134, 138, 142, 147
 Ina Primiana, 3
Increasing return to scale, 111
 Indeks Williamson, 89, 90
 India, 32, 43, 45, 47, 48, 78, 89, 116, 121, 124, 126
 Indikator, 39, 87, 88, 91, 99, 139
 Industri berbasis agro, 37, 38
 Industri berbasis bahan tambang mineral, 37
 Industri berbasis migas, 37, 38
 Industri besar, 7, 8, 33, 61, 63, 64, 65, 66, 72, 77, 106, 127, 129
 Industri hijau, 80, 81, 82
 Industri hilir, 61, 63, 64, 68, 72, 75, 76, 79, 81, 126
 Industri hulu, 61, 62, 64, 68, 72, 77, 84, 129, 144, 163, 180
 Industri kecil, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 127, 129
 Industri manufaktur, 38, 43, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 80, 83, 84, 115, 119, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 177, 180
 Industri menengah, 61, 64, 66, 127
 Industri nasional, 3, 4, 23, 31, 32, 33, 37, 41, 44, 45, 52, 61, 65, 72, 78, 79, 80, 82, 83, 116, 117, 128, 129, 139, 144
 Industri pengolahan, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 51, 58, 66, 67, 70, 74, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 126, 127, 145
 Industri perbankan, 34, 35, 48
 Industri prioritas, 67, 68, 70, 72, 74, 129
 Industri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112,

- 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 126, 127, 128,
129, 130, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 142, 143,
144, 145, 147, 153, 155, 156,
157, 158, 159, 161, 162, 163,
169, 170, 171, 172, 173, 174,
176, 177, 180, 181
- Industrial Bank of Korea*, 43
- Industrial cluster*, 73, 129
- Industrialisasi, 4, 41, 58, 63, 77, 78,
135, 139
- Inefisiensi, 25, 165
- Infrastruktur, 4, 15, 16, 17, 18, 23,
25, 46, 47, 49, 50, 66, 67, 73, 79,
83, 122, 124, 131, 136, 139, 140,
144, 145, 146, 148, 157, 159,
161, 162, 163, 171, 181
- Inklusif, 95, 145
- Inpres, 37, 145
- Input, 4, 5, 6, 7, 63, 90, 134, 137, 156
- Integrasi ekonomi, 122, 123, 140,
147
- Integrasi, 47, 116, 118, 119, 122,
123, 125, 130, 140, 147, 163
- Interlocutor*, 116
- Intermediasi perbankan, 35
- Internal, 120, 124, 134
- Intra-ASEAN, 124
- Inventori, 99
- Investasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 18, 25, 32, 33,
37, 38, 41, 46, 47, 50, 58, 60, 62,
64, 70, 71, 73, 92, 98, 99, 116,
118, 122, 124, 126, 130, 131,
134, 140, 142, 143, 144, 145,
147, 157, 159, 163, 181
- Investor, 15, 25, 35, 73, 77, 124,
171, 180
- Iptek, 66, 78, 130
- J**
- Jangka panjang, 2, 33, 43, 46, 47, 49,
65, 74, 122, 147, 157, 171, 176,
180
- Jangka pendek, 32, 49, 173, 174
- Jasa, 40, 43, 45, 48, 62, 72, 79, 90,
92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 106,
107, 118, 122, 124, 127, 131,
142, 143
- Jawa, 16, 73, 79, 89, 136, 138, 157,
159
- Jepang, 43, 47, 50, 64, 88, 133, 139
- K**
- Kakao, 38, 66, 67, 70, 79, 166
- Kamboja, 117, 123
- Kapital, 6
- Karet, 36, 38, 58, 61, 66, 71, 74, 79,
93, 102, 104, 109, 122, 126, 135,
166
- Karlita, 14, 19
- Keamanan ekonomi, 117
- Keamanan individu, 117
- Keamanan kesehatan, 117
- Keamanan komunitas, 117
- Keamanan lingkungan, 117
- Keamanan pangan, 117
- Keamanan politik, 117
- Keamanan, 46, 80, 116, 117, 120,
121
- Kebijakan industri nasional, 33, 65,
82, 83, 129
- Kebijakan, 14, 24, 33, 35, 42, 45, 46,
57, 61, 63, 64, 65, 66, 73, 75, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 94, 95, 119,
122, 125, 128, 129, 139, 142, 143,
144, 147, 148, 161, 164, 165, 169,
170, 171, 172, 173, 176, 181
- Kebudayaan, 117, 118
- Kehutanan, 68, 80, 95, 96, 97, 98,
99, 100, , 107, 108, 122

- Kemiskinan, 89, 90, 99
 Kesejahteraan, 2, 81, 91, 117, 123
 Kesenjangan, 49, 73, 90, 119, 125, 129, 174
 Kesenambungan, 89
 Ketimpangan, 89, 90, 99
 Keuangan, 15, 18, 25, 32, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 50, 90, 93, 95, 96, 97, 98, 101, 105, 106, 107, 118, 125, 133, 172
 Konsumsi Pemerintah, 98, 99
 Konsumsi Rumah Tangga, 98, 99
 Konsumsi, 37, 58, 60, 64, 70, 80, 89, 92, 98, 99, 126, 134, 138, 157, 161, 164, 166, 167, 168, 170, 171, 177, 178, 179
 Kontraksi, 94, 99, 107
 Korea, 23, 32, 43, 44, 45, 132, 139
 Korupsi, 15, 17, 25, 147
 Kredit macet, 34, 39, 146
 Kredit, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 51, 144, 146
 Krisis ekonomi, 34, 78, 91, 92
 Krisis Eropa, 91, 101
 Krisis keuangan global, 35, 44, 50
 Krisis, 34, 35, 43, 44, 47, 50, 51, 59, 78, 88, 91, 92, 101, 145, 174
 KTT, 117
 Kualitas pertumbuhan ekonomi, 87, 89, 91, 99
 Kualitas, 3, 16, 24, 75, 87, 89, 91, 95, 99, 118, 132, 133, 139, 146, 147
 Kuantitas, 118, 139, 147
- L**
 Laju inflasi, 125, 145
 Laos, 117, 123
 Lapangan kerja, 37, 41, 45, 48, 64, 90, 106, 144
 LDR, 35
Leading sectors, 100
- Lembaga pembiayaan, 32, 33, 43, 47, 48, 49, 51
 Liberalisasi, 125, 127, 131, 147, 170
 Likuiditas, 34, 48
 LNG, 101, 156, 157, 162, 172, 180
 LPEI, 49
 LPEM UI, 16
 LPS, 39
 Luar negeri, 9, 13, 15, 33, 34, 61, 67, 70, 76, 94, 135
- M**
 M.S. Hidayat, 4
 Makro, 81, 125, 166
 Malaysia, 16, 70, 117, 132, 139, 140, 142, 147
 Mandala, 18
 Manufaktur, 38, 39, 40, 41, 43, 48, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 83, 84, 99, 115, 119, 126, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 177, 180
Mckinsey Global Institute, 119
 Migas, 10, 11, 25, 37, 38, 58, 64, 69, 76, 80, 96, 97, 101, 106, 163, 170, 171, 172, 180
 Mikro, 15, 46, 47, 49, 63, 81, 106, 166
 Mineral tambang dan batubara, 37
 Mineral, 9, 33, 37, 63, 71, 75, 76, 80, 94, 96, 157, 172
 Modal kerja, 33, 40
 Modal, 4, 5, 6, 9, 13, 18, 25, 33, 34, 35, 37, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 62, 63, 65, 71, 77, 94, 98, 118, 122, 124, 125, 126, 135, 137, 140, 142, 145, 147, 179
 Moderat, 91
 Moneter, 24, 35, 125
Multiple linier regression, 11

- N**
- Negara berkembang, 62, 73, 76, 133
 - Negara maju, 61, 63, 64, 76, 133
 - Neraca perdagangan, 84, 125, 143
 - Nigeria, 32, 43, 45, 46, 49, 78
 - Nilai tambah, 35, 37, 63, 66, 70, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 90, 106, 119, 125, 130, 136, 144
 - Nilai tukar, 94, 145
 - Non-migas, 25, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 69, 76, 83, 126
 - Non-tradable sectors*, 90, 99
 - NPL, 34, 35, 39
- O**
- Oleochemical*, 129
 - OLS, 12
 - Orde reformasi, 91
 - Otonomi daerah, 90
 - Output, 4, 5, 6, 7, 14, 20, 24, 25, 94, 126, 135, 137
- P**
- Pasar regional, 81, 123, 140
 - Pasar tunggal, 118, 121, 122
 - Pasar, 14, 23, 34, 35, 38, 41, 45, 47, 51, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 112, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 139, 140, 142, 144, 158, 163, 168, 171, 176, 181
 - PDB, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 25, 41, 43, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 83, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 119, 127
 - PDRB, 14, 19, 90
 - Pembangunan, 2, 18, 32, 37, 46, 47, 49, 64, 65, 67, 73, 74, 77, 81, 82, 83, 89, 95, 100, 116, 117, 121, 122, 123, 129, 135, 139, 145, 148, 154, 155, 156, 157, 163, 164, 165, 171, 178, 179, 181
 - Pembiayaan, 32, 33, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 171, 179
 - Pemerintah, 5, 17, 18, 22, 25, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 61, 64, 66, 67, 70, 71, 76, 81, 82, 83, 96, 98, 99, 101, 120, 133, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 155, 157, 158, 159, 161, 162, 165, 166, 170, 171, 172, 174, 179, 181
 - Pemurnian, 37, 76
 - Penawaran, 20, 21, 174, 178
 - Pengangguran terbuka, 104, 111
 - Pengangguran, 7, 20, 21, 90, 99, 104, 105, 108, 111, 142, 144
 - Pengolahan, 11, 12, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 58, 66, 70, 74, 76, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 119, 126, 145
 - Peraturan Presiden, 32, 67, 170
 - Perbankan, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 45, 48, 49, 50, 51, 95, 144, 171
 - Perdagangan, 39, 40, 41, 42, 58, 59, 72, 76, 77, 84, 90, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 105, 107, 108, 116, 118, 121, 124, 125, 131, 140, 142, 143, 147, 165, 172
 - Perekonomian, 3, 5, 15, 18, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 59, 74, 76, 78, 80, 88, 90, 91, 94, 95, 96, 100, 111, 119, 121, 123, 127, 129, 142, 145, 172
 - Perikanan, 66, 68, 79, 95, 96, 97, 98, 100, 108, 122, 155, 166

- Perindustrian, 4, 17, 24, 32, 39, 48, 51, 70, 81, 84, 119, 120, 126, 128, 165, 172, 177, 179
- Permintaan, 20, 21, 38, 58, 75, 76, 105, 125, 133, 147, 162, 165, 167, 174, 177, 180
- Pertanian, 50, 51, 68, 75, 76, 79, 80, 83, 107, 122, 129, 158, 164, 165, 166, 172, 173, 174, 177, 179
- Pertumbuhan ekonomi, 2, 36, 39, 45, 47, 51, 52, 59, 60, 61, 65, 73, 76, 77, 78, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 111, 116, 123, 126, 138, 145, 147, 154, 180
- Peternakan, 79, 95, 96, 97, 98, 100, 107, 108, 155
- Philipina, 117
- PHK, 108
- Pilar, 48, 65, 80, 116, 117, 120, 121, 122
- Pinjaman, 18, 32, 33, 45, 46, 47, 48, 50, 51
- PMA, 9, 10, 37, 60, 76, 124, 134, 135, 137
- PMDN, 37, 60
- PMTB, 99
- Politik, 15, 64, 121, 174
- Prime mover*, 106
- Prioritas, 46, 63, 64, 67, 68, 70, 72, 74, 81, 116, 122, 125, 129, 130, 143, 169, 178
- Production network*, 130, 132
- Produk, 2, 33, 38, 41, 58, 59, 62, 63, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 95, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 130, 131, 133, 134, 135, 138, 142, 145, 147, 173, 175
- Produktivitas, 5, 24, 62, 66, 79, 130, 131, 136
- Prudential regulation*, 34
- Pupuk, 36, 38, 58, 61, 69, 102, 104, 109, 126, 129, 135, 153, 155, 156, 157, 158, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
- R**
- R&D, 133, 137
- Rahardja, 18
- Regional, 47, 58, 78, 81, 90, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 131, 135, 136, 140
- Regresi, 6, 11, 12, 13, 18, 19
- Restrukturisasi, 47
- Revitalisasi, 42, 47, 66, 79, 80, 129, 153, 156, 158, 176, 177, 178, 179, 180, 181
- ROA, 35
- Rupiah, 36, 43, 94, 124, 145
- S**
- Sektor industri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 116, 119, 120, 126, 127, 128, 129, 132, 135, 139, 142, 144, 147, 156, 177
- Sektor jasa, 48, 90, 96, 100, 106, 107, 124
- Sektor keuangan, 93, 95, 96, 98, 101, 105
- Sektor listrik, 95, 96, 98, 100, 107
- Sektor pengangkutan, 59, 93, 95, 96, 98, 107

Indeks

- Sektor perbankan, 95
Sektor perdagangan, 58, 59, 72, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 105, 107, 108
Sektor pertambangan, 80, 92, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 106, 126
Sektor pertanian, 5, 40, 43, 58, 72, 79, 83, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 107, 108, 155, 166, 172, 173
Sektor primer, 94, 95, 96
Sektor prioritas, 72, 116, 125
Sektor riil, 49, 50, 51, 99, 101, 146
Sektor sekunder, 9, 94, 95
Sektor tersier, 95, 96
Semarang, 14, 19
SIDBI, 47, 48
Singapura, 16, 117, 133, 139, 140, 142, 147
Sisi pengeluaran, 98
Sistem keuangan, 34, 47
SMI, 49
Sofyan Wanadi, 23
Sosial budaya, 116, 117, 120, 121, 140
Stabilitas, 94, 116, 120, 121, 125, 145, 174
Stern, 14
Strategi, 44, 45, 63, 67, 74, 77, 78, 117, 131, 143, 144, 147, 172
Strategis, 47, 64, 65, 78, 80, 81, 83, 117, 144, 145, 155, 173
Struktur industri, 35, 36, 37, 45, 47, 56, 61, 62, 66, 67, 77, 80, 84, 112, 127, 129
Struktur perbankan, 33, 34
Subprime mortgage, 88, 91, 101
Sumatera, 79, 89, 138, 157, 159
Sumber daya alam, 2, 32, 33, 37, 41, 71, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 119, 124, 130, 133, 143, 144
Susilo Bambang Yudhoyono, 91
Susilo, 14
Swasta, 33, 46, 48, 50, 64, 133, 137, 142, 162, 171, 173, 174, 181
- T**
Tax allowence, 4, 67
Tax holiday, 4, 67
Tenaga kerja, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 37, 40, 42, 58, 62, 70, 72, 73, 78, 87, 90, 91, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 131, 133, 134, 136, 137, 142, 143, 144, 147
Thailand, 16, 117, 132, 139, 140, 142, 147
TPT, 38, 59, 72
Tradable sectors, 90, 99, 100
Transformasi, 45, 79, 80, 94, 116, 137, 145
- U**
UKM, 40, 44, 45, 46, 123
UMP, 22, 23
Undang-Undang, 2, 32, 37, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 63, 81, 82
UNIDO, 133, 139
Usaha industri, 32, 66, 129
- V**
Vietnam, 16, 117, 123, 140
- W**
WEF, 15, 16, 22, 143
World Bank, 15

BIOGRAFI PENYUNTING

Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, MADE, APU. adalah Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR). Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1957. Gelar Sarjana diperoleh dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan ke jenjang *Master Degree di bidang Agricultural Development Economics* (MADE) dari *Australian National University*, Canberra, Australia pada tahun 1986. Kemudian meraih Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dari *University of Queensland*, St. Lucia, Brisbane-Australia pada tahun 1992. Tahun 1995-1996, menjadi Staf Ahli Khusus Menteri Sekretaris Negara dalam pembuatan materi Pidato Presiden RI bidang Ekonomi. Kemudian tahun 1997-2001 menjadi Kepala Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Tahun 2001-2002 menjadi Staf Ahli bidang Ekonomi, Dewan Ketahanan Nasional. Tahun 2005-2010 menjadi Deputy Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) pada Bidang Dinamika Masyarakat dan *President of Non-Align Movement for Science and Technology* (NAM), serta *Chairman of ASEAN Committee on Science and Technology* (ASEAN-COST). Pengabdianannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi mencakup antara lain: (a) penelitian dalam bidang ekonomi pembangunan, makro ekonomi dan ekonomi internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); (b) Konsultan penelitian *Asian Development Bank* (ADB), *United Nation for Economic and Social for Asia and Pacific* (UN-ESCAP), *International Labour Organization* (ILO), UNDP, UNCTAD, UNSFIR, ISEAS, ISIS dan *World Bank*; (c) Dosen dan pembimbing mahasiswa program S1, S2, dan S3, untuk mahasiswa di beberapa Universitas seperti UI, IPB, UNPAD, dan UNTAR; (d) Mitra Bestari Buletin Ilmiah Perdagangan, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Jurnal Standarisasi, BSN; (e) Redaktur Jurnal Ekonomi UNTAR dan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI; (f) sejak tahun 2008

menjadi *Editorial Member of Journal of Social and Economic Science, International Journal of Development Research and Quantitative Techniques* dan *International Journal of Economics and Business Studies*, New York, USA; (g) Editor dari berbagai Jurnal Ekonomi; (h) Penyunting dari berbagai buku dan prosiding bertemakan ekonomi; dan (i) *Coordinator East Asian Development Network (EADN)* untuk Indonesia dan anggota *Think Tank Asian Development Bank (ADB)* sejak tahun 2010. Berbagai karya ilmiah baik dalam bentuk jurnal telah diterbitkan antara lain dalam *Review of Asian Development Bank (ADB)*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS)*, ILO dan UN ESCAP. Demikian pula dengan buku hasil penelitian yang diterbitkan oleh UN ESCAP, ILO, UNSFIR, UNDP dan ADB serta penerbit internasional lainnya. Alamat email yang dapat dihubungi adalah cmfirdausy@gmail.com dan carunia_firdausy@yahoo.com.

BIOGRAFI PENULIS

Ari Mulianta Ginting, adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 2 Mei 1981. Pendidikan Sarjana Manajemen Keuangan diselesaikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006. Magister Ilmu Ekonomi diperoleh dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2008 dengan kekhususan Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ekonomi Moneter. Bekerja di Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan konsentrasi kepakaran Ekonomi Terapan pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Ditugaskan sebagai Tim Pendukung Badan Legislasi DPR RI, melakukan pendampingan pembentukan Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, Revisi Undang-Undang Keuangan Negara, harmonisasi RUU Resi Gudang. Tahun 2012 hingga sekarang, Penulis terlibat Panitia Khusus (Pansus) RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, kemudian pada tahun 2013 terlibat dalam Pansus RUU Revisi Keuangan Negara. Penulis juga terlibat dalam penelitian kelompok Tim Ekonomi dan Kebijakan Publik, dengan berbagai topik diantaranya tahun 2011 Penelitian tentang Ketahanan Pangan di Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, tahun 2012 Penelitian Tentang Asuransi Umum dan Tahun 2013 tentang Industri Berbasis Input Lokal, dan tahun 2014 terlibat dalam Penelitian Tentang Pengembangan Potensi Panas Bumi di Indonesia. Penulis juga bekerja sebagai Dosen Honorer sejak tahun 2008 hingga sekarang untuk mata kuliah Statistika I dan II untuk Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui alamat *e-mail*: ari.ginting@dpr.go.id.

Eka Budiyantri, adalah peneliti muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Penulis menempuh studi S1 pada jurusan Matematika – Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran pada tahun 2001 dengan kekhususan matematika terapan. Kemudian melanjutkan pendidikan Pascasarjana pada Jurusan Ilmu Ekonomi – Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006 dengan kekhususan kebijakan moneter dan perbankan. Beberapa topik penelitian tentang ekonomi dan kebijakan publik telah dilakukan penulis seperti: Kebijakan Pangan Nasional: Studi Kasus Implementasi UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan; Pendekatan Sistem Agribisnis terhadap Penyelenggaraan Subsektor Peternakan; Pengembangan Industri Nasional yang Berbasis Input Lokal; dan yang terakhir tentang Kebijakan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sedangkan beberapa topik tulisan berupa bagian dari buku atau jurnal yang pernah dibuat antara lain: stabilitas sistem keuangan, subsidi pajak, *inflation targeting*, pinjaman luar negeri, ekspor Indonesia, *green banking*, dan *budget deficit*. Penulis dapat dihubungi melalui email: eka.budiyantri@gmail.com atau eka.budiyantri@dpr.go.id.

Juli Panglima Saragih, dilahirkan di Kota Tebingtinggi Sumatera Utara, 21 Juli 1964. Pekerjaan saat ini (sampai 2014) adalah Peneliti Madya Bidang Kebijakan Publik di P3DI SETJEN DPR RI, Jl. Gatot Subroto Jakarta. Pendidikan terakhir adalah S2 (Pascasarjana) Magister Manajemen, Universitas Nusantara, Jakarta selesai 1999. Pendidikan S1 diselesaikan dari FISIP Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1988. Pernah menjabat sebagai Redaktur Majalah Kajian, Penerbit PPPDI SETJEN DPR RI. Saat ini masih menjadi Redaktur Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik penerbit P3DI Setjen DPR RI. Aktif dalam penyusunan dan pembahasan undang-undang, seperti UU Anti Monopoli, UU Lembaga Keuangan Mikro, UU Perkoperasian, UU Perindustrian, RUU Migas, dan UU Usaha Perasuransian. Aktif melakukan penelitian lapangan ke daerah-daerah di Indonesia baik dalam rangka tugas pokok dan fungsi serta dalam kerangka RUU. Penulis dapat dihubungi melalui Nomor Telepon/Fax/E-mail: (021)5715987; Fax(021)5756067. Alamat e-mail:saragihjulipanglima@yahoo.co.id.

Rasbin, menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Pertanian Bogor Jurusan Teknologi Industri Pertanian pada tahun 2005. Gelar Magister Sains Ekonomi diperoleh dari Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia dengan kekhususan Ekonomi Moneter dan Perbankan pada tahun 2008. Penulis pernah terlibat dalam beberapa proyek penelitian di lingkungan Universitas Indonesia sebagai asisten peneliti dan *research fellow* di Direktorat Internasional Bank Indonesia. Penulis juga aktif sebagai asisten dosen di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi dan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia juga sebagai dosen tidak tetap di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Saat ini Penulis merupakan peneliti muda bidang ekonomi dan kebijakan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Saat ini Penulis juga terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Adapun beberapa tulisan yang pernah dibuat oleh Penulis antara lain: Analisis *Shocks* Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Terbuka: Kasus Dua Sektor Ekonomi di Indonesia, Ekspektasi Potensi *Underground Economy* di Indonesia, Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Loans* Sektor-sektor Ekonomi di Indonesia, Factors Affecting The Community Welfare of Seven Expanded Provinces in Indonesia, Strategi Antisipasi Efek Krisis Ekonomi terhadap Perekonomian Indonesia, Analisis Pengaruh Kredit Sektoral, Suku Bunga Kredit, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektoral di Indonesia tahun 2005 – 2010: Pendekatan Panel Data, Gejala Deindustrialisasi dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro sebagai Upaya Peningkatan Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Nasional, dan Subsidi dan Upaya Peningkatan Daya Saing Ekspor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: ras9bin@yahoo.co.id.

Venti Eka Satya, Menyelesaikan studi S1 pada jurusan Akuntansi – Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada Jurusan Akuntansi – Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Beberapa

topik penelitian tentang kebijakan publik telah dilakukan penulis diantaranya: Peran Diplomasi Indonesia dalam Mengatasi Kejahatan Transnasional, Pembentukan Kawasan Pariwisata Khusus Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Sektor Pariwisata Nasional, dan yang terakhir tentang Kebijakan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Karya tulis ilmiah penulis juga telah dipublikasikan di beberapa jurnal dan dalam bentuk buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: ventieka@y7mail.com.

Iwan Hermawan, menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya tahun 2002. Setelah itu penulis juga menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Instituti Pertanian Bogor tahun 2008. Saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan S3 pada Program Studi Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia. Penulis bekerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat mulai tahun 2009 sebagai peneliti bagian Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Adapun topik-topik penelitian yang telah dilakukan antara lain kebijakan pangan nasional, pendekatan sistem agribisnis dalam penyelenggaraan subsektor peternakan, pengembangan industri nasional berbasis input lokal, dan kebijakan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan topik jurnal dan buku yang telah ditulis antara lain ekonomi dan kebijakan tarif serat kapas, eksistensi sektor pertanian dan kemiskinan, peran tenaga kerja pertanian, ekonomi subsidi BBM dan kinerja perekonomian Indonesia, perdagangan beras di ASEAN, permintaan kakao Indonesia, dan *green tax*. Saat ini penulis sedang terlibat dalam tim pembahasan perubahan UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Penulis dapat dihubungi melalui email: iwan.hermawan@dpr.go.id.